

BAB IV

KONTEKS INTERNASIONAL

Bab ini membahas mengenai faktor determinan ketiga yaitu konteks internasional. Dalam penjelasannya, William D. Coplin menjelaskan bahwa sifat sistem internasional dan hubungan antara negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem, menentukan bagaimana negara itu akan berperilaku (Coplin, 1992, pp. 164-62). Dengan demikian maka bab ini menjelaskan kondisi internasional yang terjadi sehingga mendorong Indonesia untuk melakukan ratifikasi ratifikasi terhadap “*Upgrading Protocol to Amend ASEAN-China Free Trade Agreement 2015*”. Dengan demikian maka terdapat tiga (3) sub-bab yang akan dibahas dalam bab ini. *Pertama*, adalah meningkatnya tren liberalisasi pasar di kawasan; *Kedua*, adalah kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara-negara ASEAN baik dari kerjasama bilateral maupun mekanisme multilateral ACFTA; *Ketiga*, adalah kerjasama ekonomi Indonesia dengan Tiongkok sebagai partner utama dalam ACFTA.

4.1 Tren Liberalisasi Perdagangan Bebas Kawasan

William D. Coplin menerangkan terdapat tiga elemen yang penting dalam hal ini, yaitu geografis, ekonomis dan politis (Coplin, 2003, p. 167). Dalam geografis (kawasan) pada beberapa dekade terakhir, terdapat tren peningkatan perdagangan bebas di dunia. Hal ini juga terjadi di kawasan Asia Tenggara dengan ASEAN sebagai organisasi regional. Ekonomi telah menjadi salah satu pilar yang diperjuangkan di ASEAN. Dalam perkembangannya, ASEAN fokus dalam melakukan pengembangan ekonomi kawasan. Diantara yang menjadi tolak sejarah adalah implementasi “*ASEAN Economic Community*” (AEC). Dimana pada tahun 2015, negara-negara

ASEAN berkomitmen untuk menerapkan “*ASEAN Economic Community*” (AEC). Tujuan dari penerapan AEC adalah upaya untuk melakukan integrasi ekonomi negara-negara ASEAN. Upaya tersebut juga membuka peluang bagi pangsa pasar ASEAN dengan jumlah penduduk 622 juta orang, serta total pasar sebesar USD 2.6 Triliun (ASEAN, 2015). Sementara itu dalam Cetak Biru AEC ditargetkan bahwa pada tahun 2025 akan tercapai integrasi ekonomi yang kuat, kompetitif, inovatif serta terintegrasi dalam ekonomi global.

Dalam Cetak Biru AEC 2015 juga disebutkan terdapat tujuan-tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan-tujuan tersebut adalah; *a.) (i) A Highly Integrated and Cohesive Economy; (ii) A Competitive, Innovative, and Dynamic ASEAN; (iii) Enhanced Connectivity and Sectoral Cooperation; (iv) A Resilient, Inclusive, People-Oriented, and People-Centred ASEAN; and (v) A Global ASEAN* (ASEAN, 2015). Selain implementasi ASEAN Economic Community, dalam upaya untuk mendorong pengembangan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota, ASEAN juga menjalin kerjasama perdagangan dengan beberapa negara di dunia. Sejauh ini terdapat lima negara yang telah menjalin hubungan perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN. Pada tabel IV.1 dapat dilihat perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan beberapa negara mitra di kawasan.

Tabel 4.1: Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN

No.	Nama Perjanjian Perdagangan Bebas
1.	<i>ASEAN-China Free Trade Agreement</i>
2.	<i>ASEAN-Korea Free Trade Agreement</i>
3.	<i>ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement</i>
4.	<i>The ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)</i>
5.	<i>ASEAN-India Free Trade Agreement</i>

Sumber: ASEAN, 2015

Dengan bertambah banyaknya perdagangan bebas kawasan dengan negara-negara mitra maka mendorong Indonesia untuk tidak tertinggal melakukan ratifikasi terhadap perjanjian perdagangan internasional tersebut. Hal ini dilandasi oleh dua alasan; *Pertama*, dalam wacana yang digaungkan oleh presiden Joko Widodo, Indonesia berencana untuk menjadi negara maju. Majunya suatu negara juga ditentukan oleh besaran investasi yang masuk ke dalam negara tersebut. Dengan mengikuti berbagai perjanjian perdagangan bebas maka memungkinkan Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut; *Kedua*, pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Diketahui bahwa jika semua negara-negara anggota ASEAN melakukan ratifikasi dalam skema perdagangan internasional, maka hal tersebut akan membuat negara-negara tersebut mendapatkan keuntungan yang maksimal, meskipun juga kemungkinan besar mendapatkan dampak negatif. Apabila Indonesia melewatkan hal ini maka Indonesia berkesempatan besar melewatkan peluang besar, dan tentu saja tidak bisa belajar untuk menghadapi tantangan kedepan yang tentu melibatkan banyak perdagangan bebas.

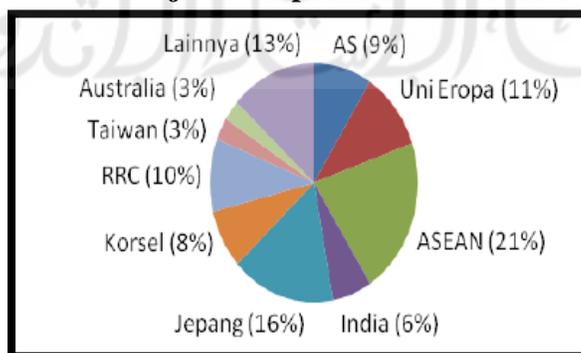
4. 2 Kerjasama Indonesia-ASEAN

Dalam penjelasannya William D. Coplin menerangkan bahwa hubungan ekonomi dan politik mempengaruhi suatu negara dalam mengambil suatu kebijakan luar negeri (Coplin, 1992, p. 167). Dalam hal ini ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap “*upgrading protocol to Amend ACFTA (2015)*” juga tidak terlepas dari kedekatan hubungan dengan ASEAN. Kedekatan yang terjalin telah terbentuk dari masa yang lama. Hal ini dilandasi dari latar belakang Indonesia yang merupakan salah satu pendiri ASEAN pada tahun 1967. Melekatnya ASEAN dengan Indonesia juga dibuktikan dengan dijadikannya Jakarta sebagai tempat berdirinya gedung sekretariat ASEAN, dengan kata lain Jakarta juga merupakan ibukota bagi ASEAN. Indonesia juga kerap disebut sebagai pemimpin ASEAN (Smith, 1999, p. 238). Posisi ini tentu menunjukkan

kedekatan antara Indonesia dan ASEAN. Kedekatan Indonesia dan ASEAN juga diperlihatkan dengan adanya kerjasama regional yang di ikat dalam “*ASEAN Community*” yang terdiri dari tiga pilar yaitu ASEAN Political-Security Community, ASEAN Socio-Cultural Community dan ASEAN Economic Community. Kerjasama kawasan ini membawa stabilitas dan terjaganya perdamaian di Asia Tenggara. Selain itu, dengan adanya ASEAN juga menghadirkan koalisi politik yang solid bagi Indonesia dalam menghadapi isu-isu internasional. Seperti halnya ketika Indonesia menghadapi upaya kemerdekaan Timor Leste, ketika mendapat tekanan dari dunia internasional terkait dengan pelanggaran Hak asasi manusia. ASEAN berdiri mendukung Indonesia secara politik dalam menghadapi tekan dunia internasional dan Timor Leste.

Disamping itu terdapat kedekatan dalam bidang kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan negara-negara mitra ASEAN dalam kerangka ACFTA. Negara-negara anggota ASEAN merupakan mitra dagang yang signifikan bagi Indonesia. Dalam neraca perdagangan Indonesia, terdapat dua komponen utama yaitu ekspor dan impor. Dalam bidang ekspor, Indonesia masih mengandalkan negara-negara ASEAN sebagai tujuan pasar utama. Besarnya pasar ASEAN bagi ekspor Indonesia dapat dilihat pada gambar 4, dimana ASEAN merupakan tujuan ekspor terbesar dengan presentase 21% dari total ekspor yang dilakukan oleh Indonesia.

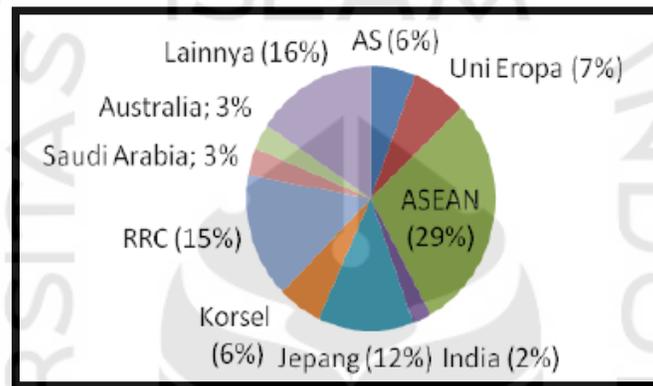
Gambar 4.1
Tujuan Ekspor Indonesia



Sumber : (Setiawan, 2012, p. 15)

Disamping itu dalam impor, negara-negara ASEAN masih menjadi tujuan impor Indonesia. Pada gambar 4 dapat dilihat bahwa ASEAN merupakan mitra impor terbesar dengan presentase sejumlah 29% dari total impor yang dilakukan Indonesia pada tahun 2010.

Gambar 4.2
Tujuan Impor Indonesia



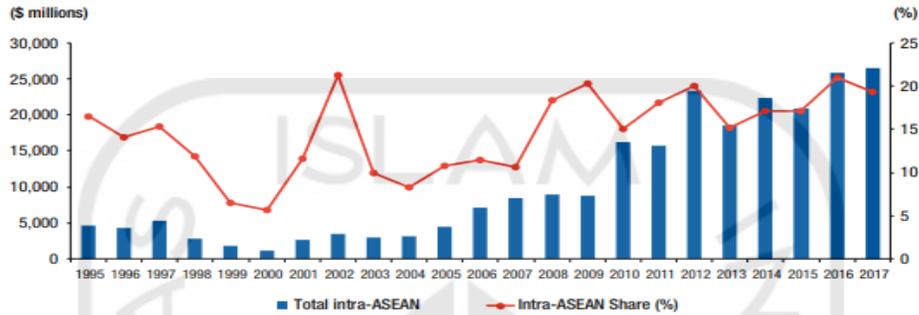
(Setiawan, 2012, p. 16)

Dengan jumlah ekspor dan impor yang cukup signifikan dengan negara-negara mitra ASEAN maka dengan tidak melakukan ratifikasi terhadap upgrading protocol to amend ACFTA membuat Indonesia tidak dapat memaksimalkan potensi ekonomi, terutama dalam bidang ekspor terkait dengan “*Rules of Origin*” dan “*Preferential Tariff*”. Dengan demikian keputusan Indonesia untuk meratifikasi upgrading protocol to amend ACFTA (2015) justru akan merugikan Indonesia sendiri, terutama berkaitan dengan ekspor.

Selain dalam bidang perdagangan, hubungan yang dekat antara Indonesia dan negara-negara ASEAN juga ditunjukkan dengan adanya angka investasi yang besar dari dua entitas. Hal ini tak terlepas dari meningkatnya investasi yang dilakukan oleh sesama negara ASEAN dalam 1

dekade terakhir. Pada grafik 4.1 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan total investasi intra-ASEAN sejak tahun 1995 hingga tahun 2017.

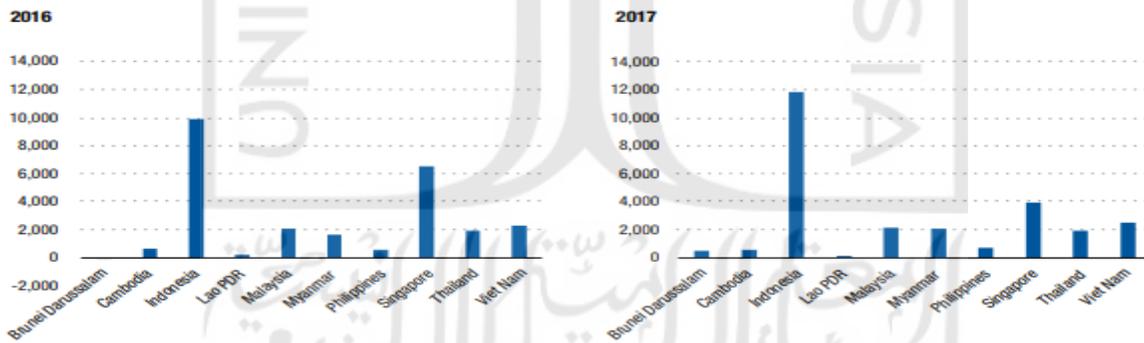
Grafik 4.1
Pertumbuhan Investasi Intra-ASEAN



Sumber : (ASEAN, 2018, p. 27)

Dari jangka waktu tersebut juga dapat dilihat pada grafik 4.2 bahwa pada tahun 2016 dan 2017 modal mayoritas yang terjadi di intra-ASEAN mengalir ke Indonesia.

Grafik 4.2
Negara Tujuan Investasi Intra-ASEAN tahun 2016 & 2017



Sumber : (ASEAN, 2018, p. 28)

Hal ini menunjukkan hubungan yang erat dalam bidang investasi antara Indonesia dan ASEAN. Bahkan negara-negara ASEAN berada di jajaran negara-negara yang menanamkan modal yang besar di Indonesia. Seperti misalnya Singapura yang menjadi negara penanam modal terbesar di Indonesia dimana realisasi investasi pada Januari-Oktober tahun 2018 saja mencapai

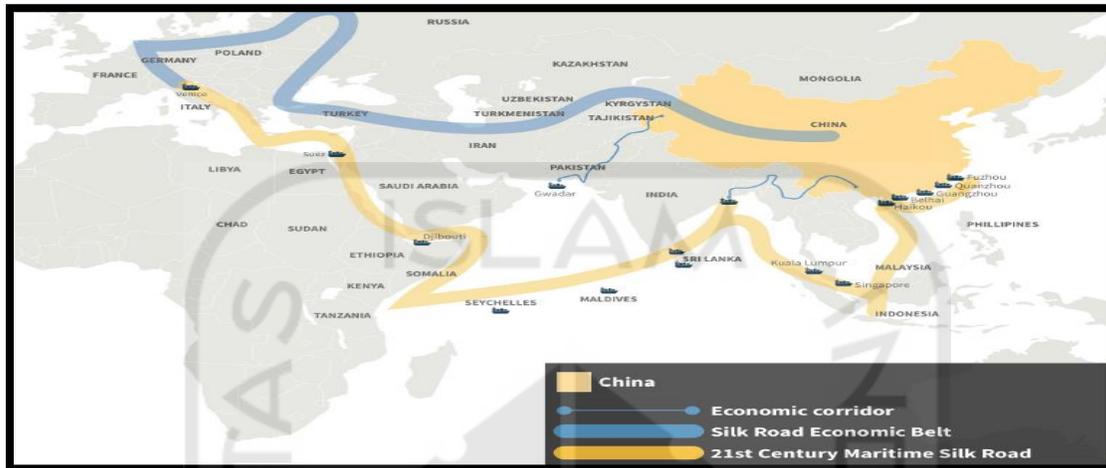
USD 6,7 milyar atau setara dengan 30,6%. Angka ini direalisasikan dalam 4.381 proyek di seluruh Indonesia. Sementara itu negara ASEAN lain yaitu Malaysia berada di peringkat keenam dengan 1.132 proyek dengan total dana mencapai USD 1.18 milyar (Sugianto, 2018). Dengan angka ini memperlihatkan bahwa dalam bidang investasi terjadi keterikatan, kedekatan antara Indonesia dan ASEAN.

4. 3 Kerjasama Indonesia-Tiongkok

Seperti pada sub-bab sebelumnya, dimana William D. Coplin menekankan bahwa hubungan ekonomi dan politik mempengaruhi pengambilan kebijakan politik luar negeri suatu negara (Coplin, 2003, p. 167). Dalam hal ini kedekatan hubungan Indonesia dan Tiongkok mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Indonesia.

Ratifikasi “*Upgrading Protocol to Amend ACFTA (2015)*” oleh Indonesia di tahun 2019 juga tidak dapat terlepas dari kedekatan kerjasama ekonomi antara Indonesia. Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok semakin erat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan adanya kepentingan bersama yang terkait dengan pengembangan ekonomi berdasarkan letak geografis. Tiongkok sejak tahun 2013 telah mencanangkan proyek untuk menghidupkan kembali jalur perdagangan sutra yang pernah terjadi pada masa Dinasti Han di tahun 1400-san. Proyek ambisus yang digagas oleh presiden Xi Jinping dinamakan “*One Belt One Road*” atau “*The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road*” dimana juga dikenal dengan “*The Belt and Road Initiatives*”. Proyek ini berusaha untuk menghidupkan jalur perdagangan yang menghubungkan wilayah dunia berupa Asia, Eropa dan Afrika. Investasi dan pembangunan yang dilakukan oleh Tiongkok merupakan salah satu realisasi dari adanya pembangunan jalur sutra modern ini. dengan demikian banyak negara-negara di dunia yang wilayahnya dilintasi oleh jalur sutra modern yang digagas oleh Tiongkok ini.

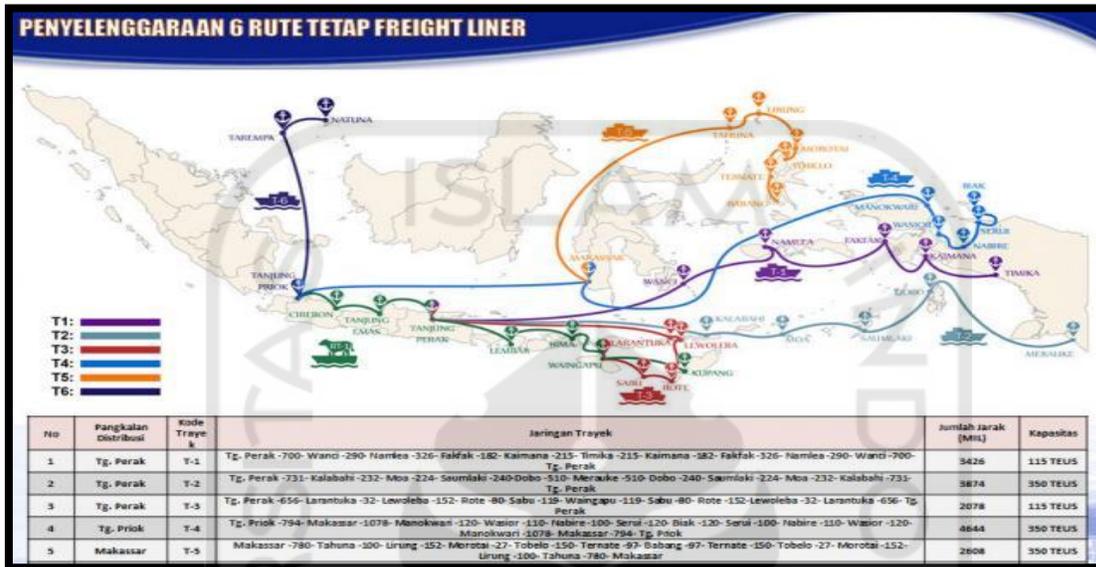
Gambar 4.3
Jalur Perdagangan One Belt One Road Tiongkok



Sumber : (Cai, 2017, p. 02)

Program *One Belt One Road* yang digagas oleh Tiongkok juga disambut baik oleh Indonesia dibawah presiden Joko Widodo. Dengan dasar program Nawacita, Indonesia juga mencanangkan “*Poros Maritim*”, dimana ingin mengembangkan potensi geografis kelautan Indonesia dengan beberapa koridor ekonomi dalam negeri. Pada KTT Asia Timur 2014 di Myanmar, presiden Joko Widodo menyampaikan program poros maritim ini dihadapan negara-negara yang hadir dalam pertemuan. Joko Widodo menekankan pada pengembangan potensi ekonomi tersebut dikembangkan dengan cara melakukan pembangunan di bidang infrastruktur kelautan atau Tol Laut. Konektivitas antar kepulauan akan menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu poros maritim Indonesia yang merupakan jalur perdagangan dan ekonomi lokal akan dihubungkan dengan jalur One Belt One Road yang digagas oleh Tiongkok. Dengan demikian maka jalur poros maritim dapat terhubung dengan jalur perdagangan ekonomi dunia melalui infrastruktur yang ada dalam One Belt One Road.

Gambar 4.4
Peta Tol Laut Indonesia



Sumber : (Dephub , 2016)

Salah satu bentuk konektivitas *One Belt One Road* adalah adanya pemberian pinjaman dan skema investasi yang diberikan oleh Tiongkok ke Indonesia. Hal ini menjadikan Tiongkok sebagai negara investor terbesar ketiga di Indonesia. Terdapat proyek-proyek strategis yang menggunakan skema investasi dan kredit dari Tiongkok. Diantara beberapa proyek-proyek tersebut adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, kawasan industri Morowali dengan nilai investasi sekitar US\$ 1.63 Milyar, pembangunan pembangkit listrik di kawasan Morowali dengan kapasitas 700 Megawatt dengan nilai investasi sebesar US\$ 650 juta.

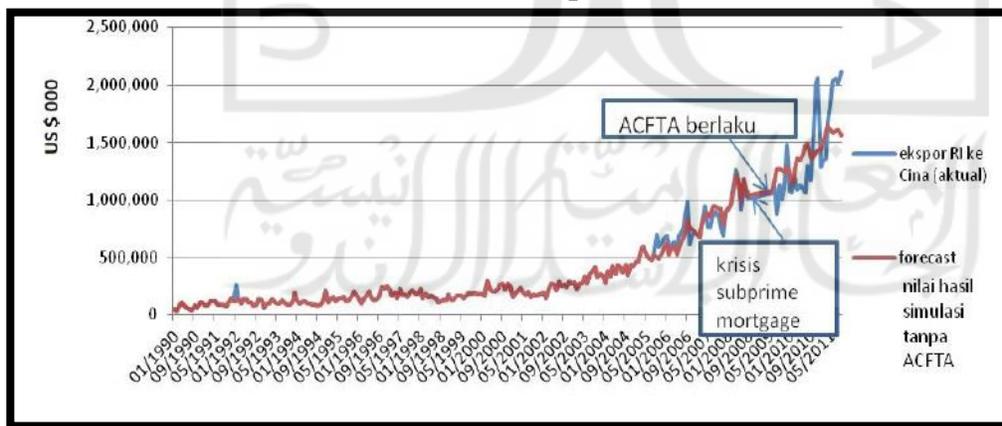
Disamping berkontribusi secara signifikan dalam bidang investasi di Indonesia, kerjasama ekonomi Indonesia dan Tiongkok juga dapat dilihat kontribusi secara massif melalui kerangka ACFTA. Berlakunya perjanjian ACFTA yang di dalamnya berisi beberapa hal seperti halnya pengurangan tarif, adanya pengaturan rules of origin membantu menaikkan jumlah volume ekspor

Indonesia ke Tiongkok. Total perdagangan mencapai US\$ 36,2 milyar (2010), jumlah 12,4% dari total ekspor Indonesia. Sementara itu dalam bidang ekspor, total transaksi mencapai US\$ 15,6 milyar, impor dari Indonesia ke Tiongkok sebesar US\$ 20,6 milyar.

Adanya preferential tariff membantu meningkatkan volume ekspor Indonesia ke Tiongkok. Pada kajian yang dilakukan oleh kementerian keuangan menemukan bahwa volume ekspor Indonesia ke Tiongkok meningkat dengan adanya skema ACFTA di tahun 2010. Dalam periode waktu 3 tahun (Januari 2009 hingga Desember 2011) paska implementasi ACFTA, terjadi kenaikan volume dan besaran ekspor Indonesia yaitu sejumlah US\$ 50,198,467,238. Temuan ini menunjukkan bahwa apabila tidak adanya penerapan preferential tariff dalam skema ACFTA maka hanya mendapatkan US\$ 49,849,336,667. Dengan demikian maka adanya implementasi ACFTA yang salah satu isinya adalah adanya preferential tariff mendorong peningkatan nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok (Setiawan, 2012, p. 17)

Gambar 4.5

Nilai Ekspor Indonesia ke Tiongkok Aktual Dengan Skema Tarif ACFTA dan Estimasi Hasil Simulasi Tanpa Skema Tarif ACFTA



Sumber : (Setiawan, 2012, p. 18)

Dengan kerjasama ekonomi yang dekat antara Tiongkok dan Indonesia, maka hal ini mendorong adanya interdependensi antara kedua negara. Dari segi program jarak panjang, proyek

One Belt One Road Tiongkok sesuai dengan poros maritime yang digagas oleh presiden Joko Widodo. Di sisi lain Tiongkok juga merupakan negara yang salah satu berkontribusi besar dalam sektor investasi di Indonesia. Disamping itu Tiongkok juga merupakan partner ekonomi dengan tujuan dan ekspor yang besar dan cukup signifikan. Dengan tidak diratifikasi protocol to amend ACFTA (2015) maka membuat Indonesia akan mengancam hubungan baik kedua negara, serta juga akan berpotensi membawa kerugian bagi Indonesia, mengingat Tiongkok merupakan partner dagang yang besar bagi ekspor Indonesia.

Disamping memiliki neraca ekspor yang besar, Indonesia juga memiliki ketergantungan besar terhadap barang-barang yang berasal dari Tiongkok. Tercatat sejak tahun 2008 hingga 2018 Tiongkok menjadi negara yang menjadi tujuan impor terbesar Indonesia (Gumelar, 2018). Adapun angka impor dari Tiongkok di dominasi oleh komponen non-migas, hal ini menjadikan Tiongkok sebagai negara asal dari 29,01% barang yang di impor oleh Indonesia. Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa dari 2014 hingga 2018, terdapat pertumbuhan angka impor yang dilakukan oleh Indonesia terhadap barang yang berasal dari Tiongkok. Dengan demikian diketahui bahwa terdapat ketergantungan besar Indonesia terhadap suplai dari Tiongkok.

Tabel 4.2: Angka Impor Indonesia atas Tiongkok

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Trend (%) 14-18	Jan-Mar		Perubahan (%) 19/18
							2018	2019	
TOTAL PERDAGANGAN	48.230.279,90	44.457.320,90	47.591.294,30	58.849.923,50	72.670.064,80	11,63	17.010.086,50	16.261.117,60	-4,4
IMPOR	30.624.335,50	29.410.887,10	30.800.493,10	35.766.832,30	45.537.830,70	10,4	10.223.478,40	10.507.191,10	2,78
MIGAS	162.781,50	186.079,20	110.953,10	254.887,20	286.657,50	15,56	58.569,00	87.594,40	49,56
NON MIGAS	30.461.554,00	29.224.807,90	30.689.539,90	35.511.945,20	45.251.173,20	10,37	10.164.909,40	10.419.596,70	2,51

NERACA PERDAGANGAN	- 13.018.391,00	- 14.364.453,40	- 14.009.691,80	- 12.683.741,10	- 18.405.596,60	- 5,85	- 3.436.870,30	- 4.753.264,60	- -38,3
MIGAS	984.073,80	1.599.669,60	1.561.799,40	1.478.530,00	2.437.486,20	18,95	385.277,30	430.147,50	11,65
NON MIGAS	- 14.002.464,90	- 15.964.123,00	- 15.571.491,20	- 14.162.271,20	- 20.843.082,80	- 6,99	- 3.822.147,50	- 5.183.412,10	- -35,62

Sumber : (Kemendag RI, n.d.)

Selain itu Tiongkok juga merupakan negara yang secara signifikan menanamkan modalnya di Indonesia. Sejak 2011 tercatat bahwa terdapat tren kenaikan investasi Tiongkok di Indonesia. Posisi Tiongkok tercatat selalu berada dalam investor lima terbesar yang menanamkan modal di Indonesia. Bahkan di tahun 2018 menjadi negara terbesar ketiga yang menanamkan modal di Indonesia. Menurut data Badan Kordinasi Penanaman Modal (BPKM) pada 2016 tercatat bahwa realisasi investasi Tiongkok di Indonesia berupa 1.734 proyek dengan nilai 2.665 milyar dolar AS. Angka tersebut meningkat secara signifikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2015, 2014. Angka tersebut tersebut bertambah pada tahun 2017 mencapai 3,3 milyar USD. Angka ini terus meningkat pada tahun 2018 sejumlah 4,4 milyar USD. Investasi yang dilakukan oleh Tiongkok juga berada pada sejumlah proyek strategis yang diutamakan oleh pemerintah Indonesia, utamanya dalam bidang infrastruktur. Dengan demikian maka hal ini menunjukkan dekatnya hubungan kedua belah negara. Pada gambar 4.5 menunjukkan bahwa terjadi perluasan investasi Tiongkok di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2016. Sementara itu pada tabel 4.4 dibawah dapat dilihat angka investasi Tiongkok di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2018.

Tabel 4.3: Angka Investasi Tiongkok di Indonesia 2014-2018

No.	Tahun	Nilai Angka Investasi
1.	2014	800,03 juta USD
2.	2015	628,34 juta USD
3.	2016	2,6 milyar USD
4.	2017	3,3 milyar USD
5.	2018	4,4 milyar USD

Sumber : (Suwiknyo, 2019), (Sukmana, 2019)

Dengan Pembahasan sebelumnya mengenai tiga faktor determinan dalam penentuan kebijakan, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan mengenai tiga faktor determinan tersebut, yaitu: a) Kondisi Domestik, b) Kondisi Ekonomi dan Militer dan c) konteks Internasional. Adapun kesimpulan dari tiga faktor determinan tersebut telah disarikan dalam grafik 4.3 sebagai berikut:



Grafik 4.3

Hasil Penelitian

